

## Data UIP

Nama dinkes  
Kontak 085258856750  
Email titikernaerawati@yahoo.com

## Informasi Utama

# menggapai asa bersama umi persameda dan bunda kespro

Tanggal Inisiatif 2012-07-17  
Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat  
Kriteria Memperkenalkan Pendekatan Baru

### Ringkasan singkat

Pernikahan pada usia dibawah 20 tahun di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menunjukkan tahun 2009 mencapai 51,19 %, pada tahun 2010 sebanyak 51,20%, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 50,92%. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2011, 5 orang ibu yang melahirkan di bawah umur meninggal saat persalinan

Tingginya pernikahan pada usia dini tersebut disebabkan karena rendahnya status ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya kondisi geografis serta budaya (malu jika anaknya dikatakan perawat tua serta ingin cepat lepas tanggung jawab sebagai orangtua)

Strategi dinas kesehatan bersama lintas sektor terkait dengan meningkatkan pengetahuan remaja dan orang tua serta tokoh masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini yang bertujuan mengikis budaya yang melekat. Kegiatan tersebut dilakukan di sekolah formal dan non formal, kelompok pengajian, pertemuan PKK maupun Kelas remaja.

Output yang dicapai dalam proses yaitu Dikukuhkannya Umi Persameda dan Bunda Kespro kabupaten dan kecamatan beserta peningkatan peran mereka tokoh agama, terbentuknya PGPK, terbentuknya Komunitas Langit biru, terbentuknya Kelas remaja. Sedangyang diharapkan yaitu menurunnya persentase pernikahan pada dini usia telah dicapai walaupun belum memuaskan.

## Proposal

### Analisis Masalah

**Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?**

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Kedua, kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Ketiga, social-budaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, diantaranya: **Pendidikan anak terputus, Kemiskinan, Kekerasan dalam rumah tangga, Kesehatan psikologi anak: Anak yang dilahirkan** : Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. **Kesehatan Reproduksi** : kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.

Prosentase pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan, Prosentasi tertinggi pada tahun 2009 - 2010 terjadi di Kecamatan Taman Krocok yaitu 75,90% ; 79,31% ; 78,45%. Yang mana kecamatan ini merupakan kecamatan baru dengan jumlah desa sebanyak 7, yang sebagian besar penduduk masuk kategori miskin dengan wilayah yang bergunung dan berbukit akses terhadap sekolah dan kesehatan yang cukup sulit.

Pernikahan usia dibawah 20 tahun di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menunjukkan tahun 2009 mencapai 51,19 %, pada tahun 2010 sebanyak 51,20%, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 50,92%.

Disamping itu, pernikahan dini ini juga berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan tahun 2011, 5 orang ibu yang melahirkan di bawah umur meninggal saat persalinan.

## Pendekatan Strategis

**Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?**

Berbagai cara bisa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin hingga harus memanipulasi usia anak mereka. Dalam surat nikahnya tercatat berumur 16 tahun, meski sebenarnya Sutik menikah di usia 13 tahun.

Fenomena pernikahan di usia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Bondowoso yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.

Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah. Namun secara perlahan, tradisi pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso banyak hal dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak perempuan di wilayah ini, seperti edukasi, advokasi, pemberdayaan anak melalui forum anak, konseling hingga gerakan masal.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertekad menekan angka pernikahan dini melalui program kesehatan reproduksi yang menasar pada **perubahan faktor sosial budaya**. Program ini **melibatkan berbagai unsur masyarakat**, seperti tokoh agama, guru, remaja, media dan lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu, program ini juga **melibatkan instansi pemerintah** lain, seperti BPPKB untuk membuat program pendidikan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dan Badan Perencanaan Daerah untuk mendapat dukungan dana operasional.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama perempuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso membuat program pendidikan

Kesehatan reproduksi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan menjadikan ibu ketua tim penggerak PKK yang merupakan tokoh masyarakat sebagai UMI PERSAMEDA dan BUNDA KESPRO lahir dari pemikiran Dinas Kesehatan karena tingginya pernikahan dini dan tingginya AKI dan AKB melalui program ini diharapkan perempuan dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga mempunyai akses ekonomi yang lebih baik dan kesehatan ibu dan anak juga meningkat

**Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif**

Program ini diharapkan dapat mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat untuk pendewasaan usia pernikahan, terutama untuk perempuan yang akan berdampak pada meningkatnya tingkat

kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan perempuan.

Melihat bahwa tokoh agama merupakan tokoh yang dipercaya dan dihormati, Dinas Kesehatan menggandeng mereka untuk memberikan penyuluhan tentang kerugian pernikahan dini ditinjau dari sisi agama.

Selain itu, Dinas Kesehatan melibatkan tokoh perempuan, seperti istri para pejabat sebagai role model yang ikut serta mengkampanyekan pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Dengan status mereka sebagai tokoh masyarakat, role model ini memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat.

Mengingat pernikahan dini sebagian besar terjadi pada anak usia SMP dan SMU, Dinas Kesehatan bermitra dengan organisasi guru, Paguyuban Guru Peduli Kespro (Kesehatan Reproduksi) untuk mensosialisasikan kesehatan reproduksi di sekolah bagi siswa SMP yang baru pada saat Masa Orientasi Siswa.

Berdasarkan pengamatan Dinas Kesehatan bahwa remaja biasanya lebih mendengarkan teman sebaya, dinas bermitra dengan komunitas kesehatan reproduksi, Komunitas Langit Biru yang anggotanya adalah para remaja untuk melakukan sosialisasi melalui seni dan media.

## **Pelaksanaan dan Penerapan**

### **Bagaimana strategi ini dilaksanakan?**

Tahapan program Kesehatan Reproduksi (Kespro) dalam penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso ini adalah: a) identifikasi tokoh masyarakat yang akan terlibat, b). penyadaran/pelatihan, c) follow up pelatihan, d) sinergi kegiatan.

Identifikasi tokoh masyarakat, dilakukan pertama kali untuk menyiapkan data awal untuk mengetahui tokoh mana yang akan menjadi target pertama dalam program ini. Dari kegiatan ini diperoleh bahwa tokoh agama, guru, LSM dan remaja merupakan tokoh kunci yang dapat menjadi target pertama program ini karena mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat .

Penyadaran/pelatihan tentang Kespro adalah bekal awal yang diberikan kepada calon partner dalam melaksanakan program Kespro. Pelatihan ini diberikan secara terpisah sesuai dengan simpul dan peran masing-masing.

Follow-up dari pelatihan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan aktifitas di masing-masing simpul. Untuk tokoh agama/ustadz mereka difasilitasi lomba ceramah tujuh menit terkait dengan Kespro. Mereka juga melakukan ceramah/pengajian dengan konten Kespro di komunitas masing-masing. Untuk guru, mereka melakukan kegiatan di sekolah-sekolah dengan konten Kespro, terutama pada waktu Masa Orientasi Siswa (MOS). Untuk remaja, diselenggarakan lomba menulis artikel, membuat video pendek, dan membuat poster terkait dengan Kespro.

Tahap berikutnya adalah membuat sinergi dengan simpul-simpul masyarakat yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan dengan bersamaan. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah kegiatan

kampanye di kecamatan-kecamatan yang merupakan sinergi antara PKK, Bunda Kesehatan Reproduksi, Dinas Kesehatan, PGPK, Ulama' dan Puskesmas. Dalam kegiatan ini masing-masing memberikan paparan sesuai dengan kompetensinya.

Dengan melihat data pernikahan dini yang tinggi, tahun 2011 sebesar 50,9%, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan daya upayanya untuk menekannya. Dinas Kesehatan yang merupakan leading sector bidang Kesehatan Reproduksi melakukan upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat. Dalam hal pelibatan pemangku kepentingan yang lain, Dinas Kesehatan Bekerjasama dengan Bappeda. Melalui fasilitasi Bappeda berbagai pihak yang concern terhadap pemasalahan pernikahan dini digandeng untuk bekerja sama untuk mengatasinya. Kementerian Agama melalui jajarannya di tingkat kabupaten, kecamatan juga dirangkul dalam melanjutkan kegiatan tentang kesehatan reproduksi ini.

Rencana Kerja dalam kegiatan ini meliputi: (tercantum dalam lampiran)

1. Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMP
2. Pelatihan Kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Pernikahan bagi Ustadz
3. Lomba Cerama Tujuh menit tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Asi Eksklusif serta Kesehatan Reproduksi
4. Pengukuhan TPPKK kabupaten Bondowoso sebagai Umi Persameda dan Bunda Kesehatan Reproduksi
5. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini di Tingkat Kecamatan dan Desa bagi orang tua dan remaja
6. Pemilihan Duta Kesehatan Reproduksi
7. Melaksanakan MOU antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Kementerian Agama tentang penyusunan dan distribusi Calon pengantin
8. Pengukuhan Umi Persameda dan Bunda Kespro kecamatan dan desa
9. Pelatihan pembuatan media promosi kesehatan reproduksi bagi remaja
10. Pembentukan Kelas remaja di semua desa sejumlah 219 desa
11. Peningkatan Kapasitas Umi Persameda dan Bunda Kesehatan Reproduksi
12. Evaluasi dan monitoring kegiatan Umi persameda dan Bunda Kesehatan reproduksi

File Pendukung : [KELAS\\_REMAJA\\_D.jpg](#)

**Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?**

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: Dinas Kesehatan, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa,kecamatan dan kabupaten, Puskesmas, Kinerja USAID, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Edellweis, Paguyuban Guru Peduli Kespro (PGPK), Ustadz/Kyai, dan Komunitas Langit Biru. Tokoh kunci masyarakat terlibat dalam kampanye kesehatan reproduksi di kecamatan sesuai dengan keahlian masing-masing. Misal, tokoh agama dan PGPK mengkampanyekan kesehatan reproduksi dari sisi budaya dan agama sementara Dinas Kesehatan dan puskesmas memberikan paparan dari tinjauan medis.

Untuk menjangkau anak sekolah, LSM Edelweiss, salah satu lembaga swadaya mitra bekerjasama dengan PGPK melakukan sosialisasi di sekolah. Komunitas Langit Biru juga aktif melakukan kampanye kepada teman sebaya melalui seni dan media.

Dinas Kesehatan dan BPPKB adalah instansi teknis yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah terkait dengan Kesehatan Reproduksi. Kedua instansi ini berkolaborasi untuk membuat program pendidikan kesehatan reproduksi yang melibatkan masyarakat.

Untuk mendukung koordinasi kerjasama lintas sektor dan APBD untuk operasional kegiatan, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan multi-pihak.

TP PKK berkontribusi dalam kegiatan kampanye Kesehatan reproduksi di kecamatan-kecamatan. Media yang digunakan adalah pertemuan bulanan PKK Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut berkolaborasi antara Bunda Kespro, PGPK, Ustadz, Dinkes, dan Puskesmas. Bunda Kespro memberikan paparan umum tentang pentingnya Kespro dan pencegahan pernikahan dini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memberikan paparan tentang tinjauan kesehatan, PGPK dan Ustadz memberikan paparan ditinjau dari pendekatan cultural dan relegi, Puskesmas memberikan paparan tentang dampak nyata dari pernikahan dini melalui cerita nyata dari wilayah masing-masing.

### **Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?**

Dinas teknis yang melaksanakan kegiatan Kespro adalah Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Sementara itu, Bappeda bertugas untuk mengkoordinasi kerjasama lintas sektor.

PGPK (Paguyuban Guru Peduli Kespro) adalah guru-guru yang telah dilatih tentang Kespro, sehingga ketika melakukan sosialisasi atau kampanye tentang Kesehatan reproduksi.

Tokoh agama yang telah dilatih tentang kesehatan reproduksi menjadi agen yang efektif ketika berhadapan dengan masyarakat umum. Disamping pengetahuannya tentang Kespro, ketokohan dan keilmuannya di bidang agama menjadikannya efektif dalam menyampaikan penjelasan tentang Kesehatan Reproduksi

Berbekal keterampilan yang dimiliki ditambah dengan pelatihan tentang Kespro yang telah diperoleh Komunitas Langit Biru memberikan sentuhan tersendiri dalam pendidikan Kespro dikalangan remaja. Media seni dijadikan alat untuk menyampaikan idenya, baik melalui kerajinan tangan maupun pembuatan video-video pendek.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Kespro di lingkup SKPD dialokasikan melalui dana APBD. Kegiatan yang didanai melalui APBD ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Dukungan pendanaan berikutnya adalah dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Program Kinerja-USAID. Dukungan ini lebih banyak diarahkan kepada pelatihan-pelatihan dan pendampingan.

Ada beberapa kegiatan yang secara sasaran cukup efektif akan tetapi tidak harus disiapkan

anggaran secara khusus, seperti sisipan konten melalui ceramah dan pengajian para ustadz baik dikomunitasnya maupun di tempat lain dimana para ustadz itu diundang. Hal ini didukung oleh partisipasi masyarakat yang dalam hal ini memberikan dukungan berupa konsumsi, tempat kegiatan dan sarana prasarannya. Kegiatan kampanye Kespro di kecamatan-kecamatan tidak perlu menyediakan anggaran khusus karena bisa bergabung dengan agenda rutin Pleno PKK di masing-masing kecamatan.

Untuk aktifitas kampanye kesehatan reproduksi di kalangan remaja, Komunitas Langit Biru memiliki cara tersendiri dalam menggali dana. Kadang kala mereka menjual karya seni buatan tangan mereka sendiri.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bunda Kesehatan Reproduksi dan Umi Persameda berasal dari Badan Pembangunan daerah, Dinas Kesehatan kabupaten, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Swadaya masyarakat.

Beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan ini berupa bantuan konsumsi, penyediaan tempat dan sarana serta penggerakan masyarakat. Besaran anggaran daerah yang digunakan untuk kegiatan ini Rp. 250.000.000,-

### **Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?**

Keluaran yang dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah makin meningkatnya remaja yang mendapat akses pelayanan KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi), Pelayanan Konseling dan Medis dalam hal kesehatan reproduksi baik didalam gedung puskesmas maupun diluar gedung Puskesmas

Selain itu meningkat pula jumlah tokoh masyarakat, guru, organisasi wanita yang terlatih kesehatan reproduksi dan telah memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini

Pada tahun 2013 jumlah Bunda Kespro kecamatan yang dikukuhkan mencapai 23 orang, selanjutnya pada tahun 2014 telah dikukuhkan 219 Bunda Kespro untuk 219 desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, sedangkan pada tahun 2015 telah dikukuhkan sebagai bunda kespro yang mutasi dan baru dilantik sebagai TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) baik untuk kecamatan maupun desa.

Keluaran yang cukup signifikan dari program kesehatan reproduksi ini adalah penurunan angka pernikahan dini tahun 2013 turun hingga 6,66% dari tahun 2012. Berdasarkan survey BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), pernikahan dini yang semula mencapai 50.9% dari seluruh pernikahan di kabupaten ini turun menjadi 50% pada tahun 2012 dan 43.34% tahun 2013. Trend ini diharapkan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar tentang kerugian pernikahan dini. Kami juga berharap dari inovasi ini nantinya juga akan berdampak terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bondowoso.

Dalam hal peraturan perundangan, melalui program Kespro ini telah terbit beberapa Surat Keputusan dan Peraturan Bupati, yaitu: a) Perbup No 41 Th 2012 Tgl 14 Desember 2012 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi Baru Lahir, b). SK Bupati Bondowoso No188.45/150.A/430.62/2012 tentang Pengangkatan Ibu Bupati, Perwakilan Guru

& Pendidik Sebaya Sbg Duta Kespro, c).SK Bupati No. 188.45/450A/430.62/2012 tentang Pengukuhan Hj. FAIZAH AMIN SAID HUSNI sebagai Umi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini dan ASI eksklusif (PERSAMEDA) d). SK No 188.45/1698/430.6.2/2013 tentang Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa sebagai Umi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Persameda) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)

### **Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?**

Kegiatan terkait Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan oleh SKPD monitoring evaluasinya dilakukan oleh SKPD masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh lembaga itu sendiri dan ditambah dengan evaluasi bersama ketika dilaksanakan rapat koordinasi.

Dinas Kesehatan melakukan evaluasi tahunan keberhasilan program kesehatan reproduksi ini menggunakan data tentang tingkat pernikahan dini yang dikumpulkan oleh BPPKB. Melalui data ini Dinas Kesehatan melihat apakah terjadi penurunan trend pernikahan dini.

Cara yang digunakan untuk memantau keberlangsungan program ini melalui kegiatan Pleno PKK mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Sedangkan di dinas kesehatan dengan menggunakan indikator pada Desa Siaga yang difokuskan pada Perencanaan persalinan dan Pencegahan Komplikasi serta untuk pelayanan remaja melalui pelaporan bulanan dari puskesmas yaitu jumlah remaja yang mendapat pelayanan konseling dan penyuluhan.

### **Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?**

Memang di awal tidak mudah untuk memahami tokoh-tokoh agama dalam hal pernikahan dini. Karena dalam pemahaman mereka anak lebih baik disegerakan menikah agar terhindar dari perzinaan. Sepintas sepertinya memang benar pemahaman mereka, akan tetapi ditinjau dari segi kesehatan, anak seusia mereka yang menikah dini organ tubuhnya masih dalam proses perkembangan. Jadi belum matang untuk mengandung dan melahirkan. Apalagi ketika ditinjau dari pendidikan, anak yang menikah dini potensial untuk tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai, karena harus mengandung, melahirkan dan merawat anak.

Di lain pihak kendala juga berasal dari para orang tua yaitu budaya tunangan sejak usia dini dan adanya anggapan bahwa jika anaknya tidak segera menikah dikatakan tidak laku(perawan tua) oleh tetangga. Mereka juga ingin cepat lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, selain karena keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya.

Sedangkan kendala lain juga berasal dari anak sendiri yaitu anak melakukan hubungan seks pada usia dini sampai mengalami kehamilan dan harus menikah, hubungan seks yang mereka lakukan karena adanya akses tentang pornografi melalui media internet didukung oleh terbukanya kesempatan oleh orang tua bila sudah ditunangkan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut diatas adalah dengan tetap memberikan

edukasi kepada orang tua baik secara individu maupun kelompok, sedangkan remaja yang putus sekolah melalui kelas remaja dan untuk remaja sekolah melalui penyuluhan kelompok pada saat Masa Orientasi Siswa.

Sedangkan untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan melakukan koordinasi dan advokasi pada stakeholder untuk tidak melaksanakan pernikahan pada anak dibawah usia 20 tahun.

Sedangkan jika anak terlanjur menikah dilakukan konseling oleh petugas kesehatan pada calon pengantin untuk menunda kehamilan sampai umur 20 tahun.

Beberapa Bunda Kesehatan reproduksi baik ditingkat kecamatan maupun desa yang telah mendapat pembekalan mengalami mutasi dan masa jabatan yang telah berakhir perlu dilakukan pembekalan dan pengukuhan lagi.

## **Dampak dan Keberlanjutan**

### **Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?**

Sejak program pendidikan reproduksi ini dijalankan tahun 2011, perubahan signifikan mulai terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga pemerintahan, tersedianya peraturan pendukung dan penurunan angka pernikahan dini.

Sebelum program ini dilakukan, banyak masyarakat masih menganggap bahwa budaya pernikahan dini adalah hal yang biasa. Namun setelah Dinas Kesehatan melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh masyarakat, guru dan remaja melalui bantuan teknis Kinerja USAID, semakin banyak masyarakat mengetahui bahwa pernikahan dini berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, banyak komunitas pendukung kesehatan reproduksi yang muncul untuk membantu dinas melakukan penyuluhan di lingkungan mereka, seperti PGPK dan Komunitas Langit Biru.

Tidak hanya menggugah masyarakat awam, para istri pejabat juga tergerak untuk terlibat aktif untuk ikut serta mengkampanyekan pendewasaan usia pernikahan.

Kerjasama lintas sektoral sangat terlihat pada kampanye tingkat kecamatan, dimana masing-masing pihak melakukan penyuluhan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Kerjasama lintas sektor telah membantu dinas untuk melakukan efisiensi anggaran untuk pelaksanaan program kesehatan reproduksi ini. Dinas tidak lagi harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar karena sebagian kegiatan telah dianggarkan sebagai kegiatan rutin BPPKB. Kemitraan ini juga membantu Dinas Kesehatan untuk mendapatkan data akurat tentang tingkat pernikahan dini yang bisa dinas gunakan untuk mengevaluasi program.

Selain itu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan tidak lagi hanya bergantung pada Dinas Kesehatan. Disamping itu, tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sementara kegiatan sosialisasi dilakukan melalui bantuan komunitas independen dan masyarakat.

Melalui inovasi ini pula sudah ada komitmen bersama bahwa permasalahan di kabupaten Bondowoso tentang pernikahan dini adalah permasalahan bersama yang harus diselesaikan bersama sama pula mulai dari kerjasama beberapa instansi, masyarakat dari kalangan pemuka sampai masyarakat luas, mulai dari orang tua sampai ke remaja.

### **Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?**

Dinas teknis menyelesaikannya melalui kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara di tokoh kunci masyarakat, mereka melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan Kespro sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Di saat-saat tertentu mereka bersinergi untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui event-event yang telah disiapkan.

Keterlibatan masyarakat yang kuat dalam program pendidikan kesehatan reproduksi ini menunjukkan adanya potensi keberlanjutan. Munculnya kelompok-kelompok pendukung kesehatan reproduksi mencerminkan bahwa masyarakat lebih sadar tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan dan mereka juga mengetahui bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pencegahan pernikahan dini. Dengan komitmen yang kuat dari masyarakat ini, program pendidikan kesehatan reproduksi dapat terus dijalankan.

Kerjasama lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan BPPKB yang dikoordinasi oleh Bappeda memberikan indikasi bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kerjasama lintas sektor ini berpotensi untuk dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak instansi pemerintah.

Konten Kespro yang sudah dilaksanakan dalam salah satu kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) bisa dijadikan agenda tahunan untuk anak sekolah.

Sudah ada surat keputusan untuk mengangkat para istri pejabat menjadi role model dalam program kesehatan reproduksi. Keterlibatan tokoh perempuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang mempunyai kapasitas memadai dan berkomitmen untuk mencegah pernikahan dini.

Kegiatan-kegiatan kesehatan reproduksi secara angka terbukti bisa menurunkan tingkat pernikahan dini dan lebih dari itu mampu mensinergikan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bondowoso dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Hal ini menjadi modal penting dalam mensukseskan program apapun di daerah.

Proses penyadaran dan pelatihan kepada simpul masyarakat ini menjadi prioritas utama dalam kampanye tentang kesehatan reproduksi. Simpul masyarakat yang lain hendaknya juga disentuh, diantaranya adalah segmen remaja.

Ketika sudah satu pemahaman tentang permasalahan daerah, maka untuk langkah lebih lanjut dalam mensinergikan semua potensi yang ada di daerah menjadi tidak sulit.

Dengan hasil yang telah dicapai oleh Kabupaten Bondowoso tahapan kegiatan yang sederhana ini

memungkinkan untuk direplikasi di daerah lain yang memiliki problem yang serupa.

Upaya massif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait dengan penurunan angka pernikahan dini melalui Program Kespro ini selaras dengan beberapa item dari 8 area perubahan sebagaimana Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, masyarakat mulai merasakan bahwa hal ini sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Sehingga tingkat partisipasi mereka untuk melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi juga meningkat. Hal ini yang menjadikan kegiatan tersebut untuk tetap bertahan di Kabupaten Bondowoso.

### **Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?**

Dari serangkaian kegiatan kesehatan reproduksi dalam rangka penurunan angka pernikahan dini ini, hal penting yang bisa diambil pelajaran adalah: kesadaran bersama dari para pemangku kepentingan atas permasalahan daerah dan sinergitas untuk menyelesaikannya.

Atas dasar ekspos dari pemerintah kabupaten tentang tingginya angka pernikahan dini dan dampak negatifnya, maka hal ini mengundang keperhatian para pemangku kepentingan.

Terkait dengan pelayanan public pemerintah daerah telah mendekatkan layanan ke masyarakat terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi/pemahaman yang memadai tentang Kespro.

Terkait dengan pola pikir dan budaya aparatur, program Kespro ini telah meningkatkan pemahaman dan sekaligus keterampilan aparatur dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan daerah. Problem pernikahan dini disadari bahwa hal itu bukanlah permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas/Instansi pemerintah saja, akan tetapi akan jauh lebih efektif apabila melibatkan simpul-simpul masyarakat dalam menyelesaikannya.

Hal yang bisa dijadikan pembelajaran juga bahwa kesehatan reprodksi bukanlah hal yang tabu untuk didiskusikan. Karena dari pemahaman yang sempit itulah kesehatan reproduksi dianggap tabu sehingga orang tua dan remaja tidak pernah membahas hal tersebut, yang mengakibatkan remaja mencari jalan sendiri dengan bertanya pada internet yang malah menjerumuskannya.